

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh PBPD Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Achmad Tohir

Nama Dosen Pembimbing : Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2026



Pendahuluan

Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun 5 (lima) tahun pada suatu daerah. Penyusunan RPB dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan prediksi kebencanaan daerah dalam periode perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta masukan dari seluruh institusi terlibat.



Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah rawan bencana yang berada di pusat pertumbuhan. Berdasarkan RPJMN IV tahun 2020-2024 diketahui bahwa terdapat beberapa program penanggulangan bencana yang diakomodir dalam program prioritas. Kondisi wilayah dalam pengkajian risiko bencana merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi. Dari kondisi wilayah, diperoleh potensi luas daerah dan jumlah penduduk terdampak bencana serta potensi bencana yang mengancam di Kabupaten Sidoarjo.



Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki BPBD untuk menanggulangi bencana di daerah. Implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi , tahap pra bencana, tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana.

Gab Masalah

- Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan tanggap darurat.
- Koordinasi antar instansi terkait saat terjadi bencana
- Masyarakat belum sepenuhnya memahami tahap awal penanganan bencana secara mandiri sehingga masyarakat masih menunggu bantuan atau aba-aba dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Penelitian Terdahulu

1. “Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana di Kabupaten Purworejo, Koordinasi BPBD Kabupaten Purworejo dalam penanggulangan bencana” oleh Bakti, V. A., & Fadlurrahman (2020) dijumpai hasil Koordinasi horizontal lebih banyak melibatkan lembaga dengan otoritas level yang sama, sedangkan koordinasi vertikal melibatkan beberapa lembaga dengan otoritas level yang berbeda. BPBD memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai komandan atau koordinator lapangan.
2. “Efektivitas Koordinasi Antar Stakeholders Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Koordinasi BPBD Kota Padang dalam penanggulangan bencana” Murni, N. Y., & Alhadi, Z. (2019) dijumpai hasil Tujuan koordinasi untuk meringankan beban para korban tercapai dengan kerjasama antara BPBD dengan stakeholders terkait. Selain itu tujuan koordinasi terkait percepatan penanganan dapat segera dilakukan melalui peran TRC dalam mengidentifikasi suatu bencana. .
3. “Efektivitas Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Dalam Penanggulangan Banjir di Kalimantan Selatan” Muzdalifah, S., Mafriana, S. B., Sompia, A. T., & Attijani, M. K. (2023) dijumpai hasil koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau kota berjalan dengan baik. Pemulihan dilakukan di berbagai sektor, termasuk pemukiman, ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Ini menunjukkan upaya untuk mengembalikan kondisi normal setelah bencana. Secara keseluruhan, penting bagi instansi-instansi terkait untuk terus meningkatkan koordinasi dan kesadaran dalam penanganan bencana pada setiap tahap.

Teori

Teori Implementasi menurut **Edward III** Memiliki tiga indikator dalam mengukur Implementasi sebagai berikut :

Komunikasi, yaitu informasi tentang kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar mereka dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai harapan

Sumber Daya, Mengenai sumber daya, faktor ini memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan Edward III menyatakan bahwa sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.

Disposisi, Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat terwujud.

Struktur Birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi.

Metode

Jenis Penelitian :
Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif

Teknik Pengumpulan Data :
wawancara, observasi dan dokumentasi

Lokasi penelitian :
BPBD Kabupaten Sidoarjo

Fokus penelitian :
Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap
Darurat oleh PBPD Kabupaten Sidoarjo

Teknik Penentuan Informan:
Teknik purposive sampling

Teknik Analisis Data Milles Huberman :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya dianalisis untuk mengkaji Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III. Menurut teori tersebut, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai berikut :

1. Komunikasi

Dimensi komunikasi dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya telah berjalan dengan adanya pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, serta penyampaian informasi mengenai prosedur, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan langkah-langkah penanganan keadaan darurat kepada seluruh pihak yang terlibat. Meskipun demikian, pada dimensi transmisi masih ditemukan kendala berupa belum optimalnya koordinasi lintas instansi karena masing-masing organisasi cenderung berorientasi pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Kondisi tersebut menyebabkan integrasi dan sinkronisasi dalam penanganan bencana belum sepenuhnya berjalan secara optimal, sehingga diperlukan penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan.

2. Sumber Daya

Dimensi sumber daya dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo secara umum telah mendukung pelaksanaan kebijakan. Dari aspek sumber daya manusia, BPBD telah memiliki personel yang kompeten dan terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan serta pembinaan. Namun, keterbatasan jumlah personel masih menjadi kendala ketika terjadi bencana di beberapa lokasi secara bersamaan. Dari aspek sarana dan prasarana, BPBD telah memiliki fasilitas penanggulangan bencana yang memadai dan dalam kondisi baik sehingga mampu menunjang pelaksanaan tanggap darurat. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat dalam melakukan penanganan awal bencana secara mandiri.

Hasil dan Pembahasan

3. Disposisi

Dimensi disposisi dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo telah memiliki komitmen, disiplin, tanggung jawab, serta responsivitas personel dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi, kompetensi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Komitmen tersebut juga dirasakan oleh masyarakat melalui respons yang cepat, koordinasi yang baik, serta penanganan bencana yang mengutamakan keselamatan masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Dimensi struktur birokrasi dalam implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo telah berjalan melalui adanya pembagian tugas yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), mekanisme koordinasi antarlembaga, serta pengambilan keputusan yang dilakukan melalui rapat koordinasi sebelum pelaksanaan penanganan bencana. Dengan struktur birokrasi tersebut, setiap instansi dapat menjalankan perannya secara terarah, terpadu, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan tanggap darurat dapat berlangsung secara efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Tanggap Darurat oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo menggunakan teori implementasi George Edward III dijumpai hasil: **pertama, komunikasi** telah dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi dengan OPD, TNI, Polri, pemerintah kecamatan/desa, dan relawan, namun koordinasi lintas instansi masih perlu diperkuat. **Kedua, sumber daya** didukung oleh personel terlatih serta sarana prasarana penanggulangan bencana, tetapi jumlah personel masih terbatas ketika terjadi bencana secara bersamaan. **Ketiga, disposisi** menunjukkan adanya komitmen, disiplin, tanggung jawab, dan kesiapsiagaan personel dalam menjalankan tugas sesuai SOP. **Keempat, struktur birokrasi** telah didukung pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dengan BPBD sebagai koordinator utama, sehingga penanganan tanggap darurat dapat berjalan secara terarah.

